



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA PEMASARAN DAN DESTINASI PARIWISATA KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat;
Dengan	: <ol style="list-style-type: none">1. Sekjen Kemeterian Luar Negeri RI yang diwakilkan oleh Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI/Sdr. Andrihadi;2. Sekjen Kementerian PU-PR RI yang diwakilkan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah/Sdr. Hermanto Dardak;3. Sekjen Kementerian Perhubungan RI yang diwakilkan oleh Kepala Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi/ Sdr. Bambang Erwan;4. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI/Sdr. Ronny F. Sompie;5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian BPPN/Bappenas diwakilkan oleh Deputi Bidang Ekonomi/Sdr. Leonard Tampubolon;6. Deputi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata RI/Sdr. H.A. Ahman Sya;7. Kepala Pusat Data dan Informasi BKPM yang diwakilkan oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal/Sdr. Tamba H. Hutapea;8. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud RI/Sdr. Mustaghfirin Amin; dan9. Direktur Utama PT. PLN yang diwakilkan oleh Direktur Human Capital Management /Sdr. Muhammad Ali.
Hari/Tanggal	: Selasa, 31 Mei 2016.
Pukul	: 13.00 s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Drs. Utut Adianto/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.

- Acara : 1. Kebijakan Visa;
2. Pengembangan Infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata;
3. Regulasi transportasi untuk mendukung pengembangan pariwisata;
4. Kebijakan, strategi, dan program imigrasi dalam mendukung pengembangan pariwisata;
5. Kebijakan, strategi, dan program pengembangan pariwisata jangka menengah dan jangka panjang;
6. Kebijakan, strategi, dan program SDM pariwisata untuk pengembangan pariwisata;
7. Kebijakan, strategi, dan nilai investasi bidang pariwisata untuk jangka waktu 3 tahun terakhir dan target 5 s/d 10 tahun kedepan;
8. Kebijakan, strategi, dan program SMK Pariwisata untuk pengembangan pariwisata;
9. Kebijakan, strategi, dan program kelistrikan dalam mendukung pengembangan pariwisata;
10. Koordinasi dan komunikasi program kepariwisataan; dan
11. Lain-Lain

Hadir : 18 orang dari 29 Anggota Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI.

- Hadir Pemerintah : 1. Sekjen Kemeterian Luar Negeri RI yang diwakilkan oleh Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI/Sdr. Andrihadi beserta jajarannya;
2. Sekjen Kementerian PUPR RI yang diwakilkan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah/Sdr. Hermanto Dardak beserta jajarannya;
3. Sekjen Kementerian Perhubungan RI yang diwakilkan oleh Kepala Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi/ Sdr. Bambang Erwan beserta jajarannya;
4. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI/Sdr. Ronny F. Sompie beserta jajarannya;

5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian BPPN/Bappenas diwakilkan oleh Deputi Bidang Ekonomi/Sdr. Leonard Tampubolon beserta jajarannya;
6. Deputi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata RI/Sdr. H.A. Ahman Sya beserta jajarannya;
7. Kepala Pusat Data dan Informasi BKPM yang diwakilkan oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal/Sdr. Tamba H. Hutapea beserta jajarannya;
8. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud RI/Sdr. Mustaghfirin Amin beserta jajarannya; dan
9. Direktur Utama PT. PLN yang diwakilkan oleh Direktur Human Capital Management/ Sdr. Muhammad Ali beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.30 WIB oleh Wakil Komisi X DPR RI/Ketua Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI/Drs. Utut Adianto, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR RI, Kepala Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan RI, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian BPPN/Bappenas RI, Deputi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata RI, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud RI, dan Direktur Perencanaan PLN, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

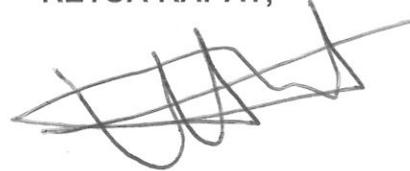
1. Pengembangan pemasaran pariwisata melalui kebijakan bebas kunjungan visa untuk 169 negara harus diikuti dengan peningkatan pengamanan yang terukur sebagai kondisi yang menjamin ketertarikan wisman berkunjung ke Indonesia.
2. Program kerja Kementerian PU-PR RI dan Kementerian Perhubungan RI dalam mendukung pengembangan pariwisata harus lebih konkrit, terwujudnya infrastruktur dan konektivitas kawasan pariwisata yang lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas antarwilayah.

3. Dalam pengembangan kepariwisataan, setiap K/L agar:
 - a. Setiap regulasi kepariwisataan yang diterbitkan harus dapat mendukung iklim kepariwisataan yang kondusif.
 - b. Membuat peta jalan (*roadmap*) menuju target 20 juta wisman pada tahun 2019 yang aman, nyaman, dan pelayanan prima baik dari sisi akses maupun dari amenities.
 - c. Fokus sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta menghindari kebijakan, strategi, dan program kerja yang tumpang tindih pada antarlembaga (contoh sederhana program kerja yang tumpang tindih antarlembaga adalah promosi pariwisata, mengikuti pameran, penugasan *officer*, dll).
 - d. Menghitung secara cermat, akurat, dan proporsional dalam hal pembiayaan kepariwisataan di destinasi utama, destinasi prioritas, destinasi bahari, destinasi khusus dan reguler.
4. Kementerian Pariwisata RI perlu melibatkan SMKN dan SMK Swasta jurusan pariwisata, PTN dan PTS prodi pariwisata, dan para pemangku kepentingan lainnya (misal lembaga sertifikasi profesi) dalam percepatan penyiapan SDM pariwisata berstandar minimal ASEAN.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.45 WIB

KETUA RAPAT,



DRS. UTUT ADIANTO